



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS STRATEGI PEMBERDAYAAN DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SEBERANG TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sri Suro Wardani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : srisurowardani17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 148 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta Berdasarkan hasil pengamatan penulis memang Cukup baiknya Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini.

Keywords: Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan

Abstract

This research was conducted in Seberang Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the Village Empowerment Strategy in Alleviating Poverty in Seberang Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how the strategy of village empowerment in poverty alleviation in Seberang Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. Sampling technique using random sampling technique, namely the taking of sample members from the population is done randomly without regard to the existing strata in the population. Analysis of the data used is descriptive quantitative, which analyzes the data obtained from the results of distributing questionnaires, then processed, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the distribution of questionnaires that have been carried out regarding the Village Empowerment Strategy in Poverty Alleviation in Seberang Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency which produces an average value of 148 means that it is in the Good Enough interval. And based on the author's observations, it is indeed quite good that the Village Empowerment Strategy in Alleviating Poverty in Seberang Taluk Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency.



Keywords : Village Empowerment Strategy in Poverty Alleviation

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. dalam hal ini pemerintah desa membuat kebijakan tentang desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dientaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya jauh lebih jelas.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan.

Sedangkan di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah sendiri masih terdapat warga miskin, meski desa ini berada di dekat pusat kota, ini terjadi didasarkan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai ketidaktetapan pekerjaan seperti buruh, petani, nelayan, serta masih banyaknya pengangguran karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka seharusnya pemerintah desa harus bisa mengatasi kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraannya adalah pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, tertib



penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.

Desa dengan segala bentuk kompleksitas di dalamnya akan sangat bergantung pada aparatur pemerintahannya dalam memajukan kesejahteraan bagi warganya. Dengan aparatur pemerintah desa yang kredibel, akuntabel dan akseptabel akan sangat memungkinkan terbangunnya suatu sistem pemerintahan yang kuat dalam membangun desanya. Berkaitan dengan strategi pembangunan desa untuk pengentasan kemiskinan, yang dilakukan Pemerintah Desa Seberang Taluk melaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, banyak program program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang di susun sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Desa Seberang Taluk, namun banyak program yang tidak optimal, Berdasarkan Observasi penulis dilapangan Pemberdayaan masyarakat tidak benar-benar tepat untuk pengentasan kemiskinan, Strategi untuk pengentasan kemiskinan disusun pemerinah desa seberang taluk terutama melalui Program Pemberdayaan masyarakat, namun Program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan belum optimal, banyak pemberdayaan yang tidak terlaksana dengan baik, dimana pelaksanaannya hanya sekedar terlaksana saja tanpa benar-benar memperhatikan hasil pelaksanaannya, Pengembangan sumberdaya manusia tidak benar-benar tepat untuk penanggulangan kemiskinan, Pengembangan kelembagaan kelompok pemuda yang tidak berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan, serta tidak adanya program dalam Pengembangan usaha produktif yang mana pengembangan usaha produktif akan benar-benar bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan

Rencana pembangunan desa tersusun dalam buku rencana pembangunan desa, seperti dapat dilihat pada buku rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa), terlihat pemberdayaan yang direncanakan yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Strategi yang disusun pada buku RPJM Desa diharapkan dapat menjadi strategi pemerintah desa dapat mengentaskan kemiskinan. Di Desa Seberang Taluk terdapat banyak strategi sebagai program untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan desa Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah. Berikut pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Seberang Taluk pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 : Tabel Program Untuk Pengentasan Kemiskinan Didesa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		
	- Peningkatan kelompok-kelompok pertanian.	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
	- Peningkatan kelompok-kelompok peternakan	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
	- Peningkatan kelompok-kelompok perikanan	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
2	Pelatihan Agribisnis Manajemen Usaha	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
3	Pelatihan Ekonomi Masyarakat Kecil	Rp.10.000.000,.	Terlaksana



4	Pelatihan Home Industri	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
5	Pelatihan Kerajinan	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
6	Pelatihan Wirausaha/Enterpreniur	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
7	Pelatihan Sistem Informasi Desa	Rp.10.000.000,.	Terlaksana
8	Pelatihan Jahit + Bordir	Rp.10.000.000,.	Terlaksana

Sumber : Desa Seberang Taluk 2021

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat di desa Seberang Taluk terdapat banyak strategi untuk pemberdayaan masyarakat yang telah di susun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan transfer, yang mana pendapatan transfer terdiri dari dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi, Serta Alokasi Dana Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Cukup banyak program-program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, berikut peserta yang ikut dalam program desa :

Tabel 1.2 : Tabel Jumlah dan penerima Pemberdayaan Didesa Seberang Taluk

No	Jenis Pemberdayaan	Jumlah	Keterangan
1	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	8 Kelompok	Masyarakat
2	Pelatihan Agribisnis Manajemen Usaha	1 Kelompok	Masyarakat
3	Pelatihan Ekonomi Masyarakat Kecil	2 Kelompok	Masyarakat
4	Pelatihan Home Industri	1 Kelompok	Masyarakat
5	Pelatihan Kerajinan	2 Kelompok	Masyarakat
6	Pelatihan Wirausaha/Enterpreniur	1 Kelompok	Masyarakat
7	Pelatihan Sistem Informasi Desa	1 Kelompok	Masyarakat
8	Pelatihan Jahit + Bordir	4 Kelompok	Masyarakat

Sumber : Desa Seberang Taluk 2021

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat Jumlah dan penerima Pemberdayaan Didesa Seberang Taluk, namun banyak program yang tidak optimal, Berdasarkan Observasi penulis dilapangan program-program yang disusun oleh pemerintahan desa Seberang Taluk khususnya program-program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan tidak benar-benar tepat untuk pengentasan kemiskinan, dan Program yang dilaksanakan belum optimal, banyak program yang tidak terlaksana dengan baik, dimana pelaksanaan hanya sekedar terlaksana saja tanpa benar-benar memperhatikan hasil pelaksanaannya, Pengembangan sumberdaya manusia tidak benar-benar tepat untuk penanggulangan kemiskinan, pelatihan hanya sekedar terlaksana saja tanpa benar-benar ada kelanjutan untuk penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Hasil Observasi penulis dilapangan tersebut terlihat bahwa kurang maksimalnya strategi pemerintahan desa dalam pengentasan kemiskinan di Desa Seberang Taluk ini, dimana strategi pembangunan desa yang diharapkan dapat untuk pengentasan kemiskinan tidak benar-benar efektif untuk pegentasan kemiskinan, Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian “Analisis Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang di sebut “adminstrasi” menurut Ali (2015:19) adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika di bubuhi awwalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan dinamikanya.

Menurut Suwarno (dalam Afifudin, 2015 : 3) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan : catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis yuntuk di dokumentasikan, agar mudah menemukannya bila di perlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yangbersifat teknis, ketatausahaan (*clerical work*), jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Administrasi menurut arti luas berasal dari kata *Administration* (bahasa inggris). dibawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat, arti definisi administrasi dalam arti luas, yaitu :

Menurut The Liang Gie (dalam Afifudin, 2015 : 4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu

Menurut Ali (2015:100) Setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta di pengaruhi oleh pemikiran rasional munculah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori structural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip non hierarkis teori prilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Ngusmanto, 2015:15) Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya, dan Menurut Simmon Administrasi (dalam Syafi, 2010:13) dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Anggara (2012:159) Ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang, ilmu administrasi) yang secara khas melakukan kajian terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari pada sistem dan aparatur pemerintahan.

Fungsi administrasi menurut Henry Fayol (dalam Anggara, 2012 : 144) memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu :

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Fungsi-fungsi yang di maksud di anggap sebagai basic process of administration, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan di lakukan (*Planning*).



2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan di lakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*Organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*Staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*Directing*). Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang di harapkan (*Controlling*)

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber (dalam Silalahi, 2011 : 124). menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan.

Menurut Khalil (dalam Edison, dkk 2016 : 49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan.

Menurut Etzioni (dalam Silalahi, 2011 : 125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan



organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

1. Organisasi Lini
Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).
2. Organisasi staf
Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.
3. Organisasi fungsional
Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.
4. Organisasi fungsional, lini dan staf
Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.
5. Organisasi Matriks
Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.
6. Organisasi Divisi
Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

2.1.3 Teori/Konsep Teori Manajemen

Menurut Hasibuan (2012 : 1) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Salam (2007 : 12) Menjelaskan Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien.

Terry (2010 : 16) Menjelaskan Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen dikembangkan. Menurut Schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (Edison, dkk 2016 : 7).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab, apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah



kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagiandalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para menejer, sedangkan menejer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat wewenang nya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

Menurut Hasibuan (2012 : 10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 21) ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).
3. Pengarahan
Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.
4. Pengendalian
Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan
Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.



6. Pengembangan
Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi
Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
8. Pengintegrasian
Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
9. Pemeliharaan
Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
10. Kedisiplinan
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
11. Pemberhentian
Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebabsebab lainnya.

2.1.4 Teori Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.



Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur tugas dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ialah :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;



- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa
5. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.1.5 Teori Pembangunan Desa

Pembangunan menurut Listyaningsih (2014:18) mendefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Menurut Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah (2005 : 45) Pada hakekatnya, Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa 22 pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Michael Todaro dalam Bryant dan White dalam Nain (2019 : 6) bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi



pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Todaro dalam Nain (2019 : 6-7) menjelaskan bahwa pembangunan mengandung tiga nilai utama:

1. Menunjang Kelangsungan Hidup; kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Semua orang mempunyai kebutuhankebutuhan dasar tertentu untuk memungkinkan kehidupan. Kebutuhankebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi pangan, papan, kesehatan dan rasa aman.
2. Harga Diri; kemampuan untuk menjadi seorang manusia, suatu pribadi. Komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang baik ialah harga diri, perasaan layak dan menghormati diri sendiri, tidak menjadi alat orang-orang lain demi tujuan orang lain itu semata-mata.
3. Kemerdekaan dari Penjajahan dan Perbudakan; kemampuan untuk memilih. Nilai universal ketiga yang harus merupakan bagian dari makna pembangunan ialah konsep kebebasan. Kebebasan disini hendaknya tidak difahami dalam makna politik atau ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi materil kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia oleh alam, kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, lembagalembaga dan keyakinan-keyakinan dogmatik.

Terdapat banyak kata yang memiliki makna sama dengan kata pembangunan misalnya, perubahan sosial, pertumbuhan, kemajuan dan modernisasi. Dari kata tersebut hanya ada satu istilah yang memberi makna perubahan ke arah positif, yaitu perubahan sosial. Modernisasi sering didefinisikan dalam kaitan dengan spesialisasi yang berkembang dan juga perkembangan aneka struktur serta institusi, tetapi dalam bahasa yang gampang ia berarti dipakai sebagai simbol, gaya, dan teknologi dunia pertama. Oleh karena itu penjelasan mengenai pengertian pembangu-nan akan lebih jelas jika dilihat dari landasan pelbagai teori mengenai perubahan sosial. Menurut seorang pemikir Indonesia, Soedjatmiko (Nugroho, 2014 : 95) telah mengembangkan gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembangunan sebagai proses pembelajaran dari tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Pembelajaran adalah ketika masyarakat mengembangkan kompetensi mereka secara individual dan secara kolektif, tidak hanya untuk menyesuaikan dan beradaptasi tetapi juga untuk menciptakan masa depan. Pembangunan adalah sebuah proses mempercepat perubahan sosial di setiap negara yang kurang maju untuk mengejar ketertinggalan agar menyamai pembangunan negara-negara maju.

Untuk negara-negara berkembang yang mengalami kemiskinan maka definisi pembangunan lebih banyak dikaitkan dengan pendekatan ekonomi. Menurut Ragnar Nurske dalam Nugroho (2014: 100) bahwa pembangunan harus menjadikan masyarakat berkembang secara ekonomi. Penjelasan ekonominya bersifat komprehensif, logikanya sederhana tetapi kuat: karena kemiskinan, mereka tidak dapat menabung, karena tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada investasi berarti tidak ada lapangan kerja, dan oleh karenanya tidak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan berarti miskin. Negara memerlukan pembangunan ekonomi untuk memberikan pekerjaan bagi orang-orang agar memperoleh pendapatan.

Secara umum permasalahan krusial yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan. Masalah-masalah tersebut merupakan



warisan kolonial sebagai konsekuensi dari negara baru merdeka. Pada tahap awal ketika memulai pelaksanaan pembangunan maka konsep pembangunan yang diterapkan adalah melalui pendekatan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai prioritas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara dunia ketiga.

Nugroho (2014:102) menjelaskan bahwa salah satu konsep pembangunan dipromosikan oleh Amarty Sen adalah pembangunan sebagai kebebasan (*Development as Freedom*). Pembangunan tidak hanya tentang ekonomi semata, tetapi juga tentang aspek-aspek sosial yang merupakan indikator inti karena pembangunan berarti membebaskan manusia dari ketidakmampuan dan ketidakkompetenan mereka. Gagasan Sen kemudian, menjadi gagasan yang diterima di seluruh dunia, untuk meneguhkan bahwa pembangunan seharusnya berarti pemberdayaan; pembangunan seharusnya berarti kebebasan; pembangunan seharusnya berarti pembangunan sosial.

2.1.6 Teori Pemberdayaan

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100)

Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. (Slamet dalam Mardikanto & Soebiato, 2019 : 100)

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Bertolak dari pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau



menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 105)

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 111)

1. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
4. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan mitra usaha.
5. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 161)

1. Pendekatan Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervension*. Tujuan utamanya adalah Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Pendekatan Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanyadigunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pegetahuan, keterampilan sikap-sikap klien (penerima manfaat) Agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Pendekatan Makro, pendekatan ini disebut juga sebgai strategi sistem besar (*Large-System Strategy*), karena penerima manfaat perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (Penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 161)

Startegi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan tertentu atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengam : metoda, teknik, atau taktik. Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 168)

1. Pemihkan dan pemberdayaan masyarakat



2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat,
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : (Mardikanto & Soebiato, 2019 : 169)

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yan ada, dari hasil temuan engamatan lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen unntu medorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersipakan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Prijono dalam Mardikanto & Soebiato (2019:170) mengemukakan lima strategi pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Program pengembangan sumber daya manusia,
2. Program pengembangan kelembagaan lokal
3. Program pemupukan modal swasta,
4. Program pengembangan usaha produktif, dan
5. Program penyediaan informasi tepat guna.

Dari penjelasan tadi dapat diartikan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu langkah atau upaya dalam bentuk kegiatan/program yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan atau memenuhi kekurangan masyarakat dan mengarahkan agar sumber daya manusia dan potensi yang ada bisa dikembangkan dan diolah dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2012 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017 : 8)



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan menghasilkan angka rata-rata adalah 148 dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada skala 109 -162. Dikarenakan semua indikator yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan hasil keseluruhannya cukup baik. Indikator Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah cukup baik, terlihat dengan pemerintah desa Mendorong dan memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang pertanian yang merupakan potensi di desa seberang taluk, misalnya seperti memberikan bibit tanaman, pengolahan pupuk, hingga produk olahan yang berbahan hasil pertanian. meningkatkan jalan usaha tani, untuk mempermudah dalam mengangkat hasil pertanian, Strategi pemerintah desa sudah cukup baik untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan, dengan menyusun strategi kebutuhan pengembangan untuk masyarakat desa, cukup baik pemerintah desa untuk memberikan pembinaan pelatihan, adapun program-programnya : pelatihan pupuk kompos, pelatihan membuat makanan tradisional, pelatihan pelayanan perhotelan untuk home stay.

Indikator Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Kelembagaan Kelompok adalah cukup baik, terlihat dengan Strategi Pemerintah Desa untuk memajukan kelompok-kelompok usaha dengan membina kelompok-kelompok kecil seperti pembuatan kue basah, kue kering, kerupuk dan juga kelompok-kelompok tani dengan memberikan pupuk, bibit-bibit tanaman, untuk meningkatkan hasil pertanian yang akan berujung pada peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah desa menyusun kegiatan-kegiatan pengembangan kelompok usaha ekonomi, pemerintah desa melihat potensi usaha dalam masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam menyusun bencana belanja desa, pemerintah desa memang cukup baik desa dalam mendorong anggota kelompok untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan kelompok usaha desa, terlihat dengan Pemerintah desa Melakukan sosialisasi melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK, kelompok tani, kelompok UMKM dan menyampaikan manfaat-manfaat bagi kelompok usaha.

Indikator Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pemupukan Modal Masyarakat adalah cukup baik, terlihat dengan Pemerintah desa membantu melalui program-program pemberdayaan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Namun Untuk permodalan, pemerintah desa Seberang Taluk tidak memberikan modal yang berbentuk uang untuk modal usaha masyarakat, karena dalam masa pandemi saat ini dana desa banyak digunakan untuk penanganan pandemi dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang kurang mampu, APBDesa diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dengan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang di atur sesuai undang-undang, pemerintah desa memang cukup membantu dalam bentuk permodalan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersumber diluar dana desa, pemerintah desa membantu mendaftarkan prakerja diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dengan melalui pelatihan yang diselenggarakan prakerja. pemerintah desa Membantu masyarakat yang memiliki usaha untuk mengajukan bantuan UMKM ke pemerintah pusat, pemerintah desa Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi, dengan memperbaiki jalan-jalan desa, usaha tani, membantu alat-alat pengolahan makanan dan alat-alat pertanian.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Indikator Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Usaha Produktif adalah cukup baik terlihat dengan pemerintah desa Menggandeng perbankan untuk permodalan usaha masyarakat dan merekomendasikan kelompok usaha yang aktif dalam masyarakat, dengan demikian akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal dan perbankan, pemerintah desa Memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta, pemerintah desa Memfasilitasi masyarakat yang berkumpul dengan menggunakan aula kantor desa yang bisa dipergunakan setiap saat, menggunakan internet gratis bagi masyarakat yang disediakan pemdes, juga menggunakan media sosial seperti facebook, instagram milik pemdes untuk media sosialisasi.

Indikator Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Informasi Tepat-Guna adalah cukup baik, terlihat dengan pemerintah desa menyediakan setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat Melalui media sosial, papan informasi dikantor desa dan juga canang (berkeliling kampung menyampaikan informasi dengan menggunakan pengeras suara), pemerintah desa Memberikan dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemakaian teknologi, pemerintah desa berperan memfasilitasi dan sosialisasi untuk mengembangkan usaha kelompok ekonomi masyarakat desa memang cukup baik, terlihat dengan pemerintah desa selalu memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi baik dalam musyawarah desa maupun secara langsung ke kantor desa. Pemdes selalu ada di kantor selama jam kerja.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 148 berarti berada pada interval Cukup Baik. Serta Berdasarkan hasil pengamatan penulis memang Cukup baiknya Strategi Pemberdayaan Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini, karena setiap indikator yang diujikan terdapat hasil yang cukup baik, Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengembangan Kelembagaan Kelompok, Pemupukan Modal Masyarakat, Pengembangan Usaha Produktif dan Penyediaan Informasi Tepat-Guna yang cukup baik untuk Strategi Pemberdayaan desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Seberang Taluk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Hendrius dan Ibunda Mulyati yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat m memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Ir.Hj.Elfi Indrawanis,MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Zul Ammar,SE.,ME Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi,S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Selaku dosen pembimbing I, Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin, 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Pragmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. CV Pustaka Setia : Bandung
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta : Bandung
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya manusia*. PT Bumi. Aksara : Jakarta
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Graha ilmu : yogyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nain, Umar, 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, Makasar : Garis Khatulistiwa
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT. Gramedia : Jakarta
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media, Jakarta
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan. Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama*
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Usman, Husaini. 2010. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Edisi 3. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat